

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PINJAMAN
PROGRAM KEMITRAAN (PK) DAN KOLEKTIBILITAS
PINJAMAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PKBL
BUMN PADA TAHUN 2017 - 2019**

LAPORAN PENELITIAN

OLEH

RAHMAT YULIANSYAH	NIDN	0305076902
DESY AMALIATI	NIDN	0307127003
EVA SUSANTI INDAH SAPUTRI	NIDN	0316058003
ANDI FUJI	NIDN	0320077303
BAYU AJI CATUR WICAKSONO	NPK	11170000315



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala, Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia, berkat kebesaran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wassalam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Alhamdulillah dengan dapat diselesaikannya laporan penelitian ini, yang berjudul : “Analisis Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan (PK) dan Kolektibilitas Pinjaman Terhadap Pertanggungjawaban PKBL BUMN Pada Tahun 2017 -2019”

Kami menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari segi sistematika pembahasan, bobot materi, maupun gaya bahasa yang disajikan. Hal ini semua sehubungan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki serta faktor lain selama penulisan laporan ini.

Oleh karena itu secara terbuka, peneliti merasa senang dan berbahagia, serta mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang tujuannya bersifat membangun untuk penyempurnaan. Kritik, masukan dan saran dari berbagai pihak akan dijadikan sebagai bahan pelajaran dan kajian yang sangat berguna sebagai bekal bagi peneliti dalam menyelesaikan karya tulis dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan dorongan baik moral maupun material dari berbagai pihak, sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.

Jakarta, 20 Oktober 2021

Ketua Tim Peneliti

(Rahmat Yuliansyah, SE. Ak., M. Ak., CA)
NIDN 0305076902

ABSTRACT

This study aims to determine how effective the distribution of partnership program loans and the level of loan collectibility are as a form of SOE PKBL accountability in 2017 – 2019. This research uses quantitative research with descriptive analysis. The population in this study are all state-owned companies that carry out PKBL activities in the period 2017 to 2019. The sample is determined using the slovin formula with the criteria that the company has published complete data on the Partnership and Community Development Program sector and has the necessary financial data in measuring all variables in this study, so that the total companies that were sampled in this study amounted to 10 companies. The data used in this research is secondary data. Data collection techniques through the official website of each company. This research was processed using Microsoft Excel software and using the calculation formula from the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number KEP-100/MBU/2002. This study analyzes how the effectiveness of loan distribution (PK) and how the level of collectibility of loans of each state-owned company that is the sample. The results showed that all companies were very good at fulfilling their obligations in the partnership program sector (PK). There are quite a number of companies that are very effective in distributing loans, but there are still some companies that are less effective in distributing their partnership program loans. Likewise with the collectibility rate of loan repayments, where there are many companies that have a fairly high collectibility rate but there are still companies with a low collectibility rate and of course not good.

Keywords : Effectiveness of loan disbursement, Collectability rate of loan repayment, PKBL responsibility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan dan tingkat kolektibilitas pinjaman sebagai wujud pertanggungjawaban PKBL BUMN pada tahun 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang melaksanakan kegiatan PKBL pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan kriteria bahwa perusahaan telah mempublikasi kelengkapan data pada sektor Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta memiliki data keuangan yang diperlukan dalam pengukuran seluruh variabel pada penelitian ini, sehingga total perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui situs resmi masing – masing perusahaan. Penelitian ini di olah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan menggunakan rumus perhitungan dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002. Penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas penyaluran pinjaman (PK) dan bagaimana tingkat kolektibilitas pinjaman masing – masing perusahaan BUMN yang menjadi sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perusahaan sudah sangat baik dalam memenuhi kewajibannya pada sektor program kemitraan (PK). Cukup banyak perusahaan yang sangat efektif dalam menyalurkan pinjaman, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang efektif dalam penyaluran pinjaman program kemitraannya. Begitu juga dengan tingkat kolektibilitas pinjaman, dimana banyak perusahaan yang memiliki tingkat kolektibilitas cukup tinggi tetapi masih terdapat perusahaan dengan tingkat kolektibilitas yang rendah dan tentunya kurang baik.

Kata Kunci : Efektivitas penyaluran pinjaman, Tingkat kolektibilitas pinjaman, Pertanggungjawaban PKBL

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II	5
KAJIAN PUSTAKA	5
2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	5
2.2. Landasan Teori.....	8
Selanjutnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan beberapa pengertian terkait judul penelitian.....	8
2.2.1. Efektivitas	8
2.2.2. Pengertian Pinjaman atau Kredit	9
2.2.2.1. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman	12
2.2.3. Analisis Pinjaman	14
2.2.4. Pengertian UMKM, UKM dan Koperasi	15
2.2.5. Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi	17
2.2.6. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	20
2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian	20
2.4. Kerangka Pemikiran	20
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1. Strategi Penelitian.....	23
3.2. Populasi dan Sampel.....	23

3.3.	Data dan Metoda Pengumpulan Data	24
3.3.1.	Data yang Diperlukan	24
3.3.2.	Metoda Pengumpulan Data	24
3.3.3.	Penelitian Kepustakaan (library research)	24
3.4.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.5.	Analisis Data.....	25
3.5.1.	Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	25
3.5.1.1.	Efektivitas Penyaluran Dana	25
3.5.1.2.	Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman.....	26
3.5.1.3.	Daftar Penilaian Tingkat Penyerapan Dana PUKK	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	28
4.1.1.	Sejarah Singkat Kementerian BUMN	28
4.1.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN	28
4.1.2.1.	Tugas Pokok Kementerian BUMN.....	28
4.1.2.2.	Fungsi Kementerian BUMN	29
4.2.	Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2017.	30
4.3.	Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2018.	32
4.4.	Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2019.	34
4.5.	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2017.	36
4.6.	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2018.	39
4.7.	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2019.	42
BAB V	45
Simpulan dan Saran	45
5.1.	Simpulan	45
5.2.	Saran	45
5.3.	Keterbatasan serta Pengembangan Penelitin Selanjutnya.....	46
5.3.1.	Keterbatasan Penelitian	46
Daftar Referensi	47
Lampiran	50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1 Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2017	30
Tabel 4.3.1 Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2018	32
Tabel 4.4.1 Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2019	34
Tabel 4.5.1 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2017	36
Tabel 4.6.1 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2018	39
Tabel 4.7.1 Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2019	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	21
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2017	50
Lampiran 1	Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2018	51
Lampiran 1	Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2019	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bagian dari pelaku penggerak kegiatan perekonomian yang penting untuk meningkatkan sumber penerimaan nasional. Dalam ini secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya seperti perusahaan swasta yang berskala besar maupun kecil, baik itu kepemilikan domestik ataupun kepemilikan asing. Selain itu penggerak perekonomian lainnya adalah koperasi, yang merupakan bagian dari bentuk membangun demokrasi ekonomi yang harus dikembangkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara ini, dijabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Penjelasan terdapat pada pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis untuk kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Per-02/Mbu/04/2020 Tanggal 02 April 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan

usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam peraturan menteri pasal 2 yang tercantum didalamnya, disebutkan:

1. Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai fasilitas pemerintah melalui BUMN dalam bentuk pinjaman dengan jasa administrasi (bunga) rendah, dengan prosedur dan persyaratan khusus yang lebih sederhana dengan tujuan untuk mendorong usaha kecil dan koperasi dalam memperluas dan meningkatkan usahanya.

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN diwilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN. Di masa pandemi saat ini bantuan PKBL diharapkan dapat mendorong usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk menuju kemandirian usaha. Disisi lain BUMN perlu mengamankan fasilitas (pinjaman) yang diberikan dari risiko macet. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian dan keputusan yang tepat agar pinjaman dana tidak di salah gunakan dan tepat sasaran, sehingga terjaminnya pengembalian tepat pada waktu nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari atau memperkecil risiko dalam pengembalian pinjaman, pengelola dana pinjaman pada BUMN harus mengadakan pengkajian yang seksama berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Memang banyak BUMN bermasalah dalam menjalankan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), namun bukan berarti tidak ada solusi yang menjadi jalan keluar dari kondisi tersebut. Pengelolaan yang transparan dan

akuntabel dapat menjadi solusi selain membenahi pengelolaan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya yang handal dan bertanggungjawab.

Untuk mendalami pelaksanaan PKBL yang di selenggarakan BUMN peneliti memilih tema :

“Analisis Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan (PK) Dan Kolektibilitas Pinjaman Sebagai Pertanggungjawaban PKBL BUMN Pada Tahun 2017-2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) berpengaruh terhadap pertanggungjawaban PKBL BUMN pada tahun 2017 - 2019.
2. Apakah efektivitas pengembalian pinjaman (kolektibilitas) berpengaruh terhadap pertanggungjawaban PKBL BUMN pada tahun 2017 - 2019.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data, menganalisis dan membuat kesimpulan tentang efektifitas pemberian pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada BUMN dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) berpengaruh terhadap pertanggungjawaban PKBL BUMN pada tahun 2017 - 2019.
2. Untuk mengetahui apakah efektivitas pengembalian pinjaman (kolektibilitas) berpengaruh terhadap pertanggungjawaban PKBL BUMN pada tahun 2017 - 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh informasi yang akurat dan relevan, serta bermanfaat bagi:

1. Peneliti

- Untuk memahami pelaksanaan penyaluran Program Kemitraan (PK) dan gambaran yang jelas kesesuaian antara fakta dengan teori yang ada.
- Menganalisis mekanisme penyaluran pinjaman pada Program Kemitraan (PK) yang khususnya dilaksanakan oleh BUMN pada tahun 2017 - 2019.

2. Perusahaan

- Sebagai masukan dalam melakukan pemberian pinjaman dalam Program Kemitraan (PK) dan pelaksanaan pengembalian pinjaman (kolektibilitas) dari mitra binaan.

3. Peneliti lain

- Sebagai masukan atau bahan acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hubungan kualitas pemberian pinjaman PKBL dengan efektivitas tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa, Nurul Suci et al, dari Universitas PGRI Madiun. Menggunakan penelitian kualitatif dan studi kasus menggunakan desain penelitian deskriptif, memperoleh hasil penelitian bahwa PKBL PT. Inka (persero) Madiun dalam rangka perkembangan UMKM Mitra Binaan berjalan dengan cukup efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan program PKBL sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak PKBL PT. Inka (Persero).

Wulandari, Rizki Putri et al, dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul penelitian “Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi Pada Divisi Community Development Center (Cdc) Pt Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sub Area Malang)”. Melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara memperoleh hasil pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tingkat kolektibilitas berada pada kategori lancar. Pada tahun 2014 kolektibilitas berada pada kategori lancar dan mengalami kenaikan menjadi 77,64%. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada kategori kredit bermasalah mengalami penurunan dari 20,01% menjadi 15,39%. Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya dalam meningkatkan kinerja pada pemberian kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismanto, Hadi dan Tohir Diman dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisnu Jepara, Indonesia. Menggunakan metode penelitian proportional sampling dan pengolahan data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Menyimpulkan bahwa, Program Pembiayaan

memiliki peran yang sangat penting bagi UMKM, namun sering terdapat masalah penunggakan pembayaran angsuran. Populasi pada penelitian ini yaitu semua UMKM yang menjadi peminjam di program pembiayaan UJKS Mitra Usaha dan sampai bulan November 2013 masih tergolong aktif serta telah menerima fasilitas pembiayaan sekurang-kurangnya enam bulan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa beberapa faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pinjaman baik lancar atau menunggak adalah omset usaha, lama usaha dan nilai plafon pinjaman. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UJKS dalam menjalankan program pembiayaan sehingga menjadi lebih efektif

Penelitian berjudul “ Analisis Prosedur Pinjaman Dana Kemitraan Oleh Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pusri, yang dilakukan oleh Sari DN dan S. Fransisca. Penelitian menggunakan metode deskriptif, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan bagi PKBL PT. Pupuk Sriwidjaja dimana kurangnya sosialisasi tentang PKBL bagi UMKM yang berada di wilayah cukup jauh dari pusat kota sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi, selain itu terdapat beberapa binaan yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai kesepakatan. Agar dapat mengatasi permasalahan itu harus terdapat prosedur yang baik sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang terdapat pada departemen PKBL PT. Pupuk Sriwidjaja.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suryana et al, dari Institut Pertanian Bogor yang berjudul “Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Program Kemitraan di PKBL PT. Sucofindo, Jakarta”. Metode analisis data yang digunakan adalah Logical Framework Analysis (LFA), Focus Group Discussion (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Objective Matrix (OMAX). Hasil penelitian menjelaskan bahwa PKBL PT. Sucofindo Jakarta memiliki nilai kerja 639,9 dan termasuk kedalam kinerja yang baik.

Penelitian yang berjudul “Corporate Social Responsibility And Company Performance” yang dilakukan oleh Adeneye et al dari University of Leicester, UK. Dengan menggunakan statistik deskriptif, regresi dan analisis korelasi. Hasil penelitian menjelaskan hubungan yang positif dan signifikan antara CSR, MBV dan

pengembalian modal yang digunakan. Pemeriksaan industri diharapkan dapat lebih intensif dalam upaya menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang tentunya dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif.

Penelitian oleh Badia, M T B et al, dari Universitat Autònoma de Barcelona dengan judul *Corporate Social Responsibility from the Viewpoint of Social Risk*, menyimpulkan “conception of social risk that includes the risks originated by environmental and social sustainability. Any risk involves hazards and opportunities. The success of its management consists of hedging the hazards and turning opportunities into value. CSR is the key for dealing with both goals. Opportunities can be identified through an accurate analysis that leads to discovering the unsatisfied needs contained in societal claims in general and in the private politics of Non Governmental Organizations (NGO) in particular. Bringing these opportunities into line with the corporate know-how and undertaking projects together with the stakeholders with whom synergy is possible enables corporations to create shared value. A direct hedging of social risk hazards is hardly impossible. A good corporate social image constitutes a sound hedging against social risk”.

Penelitian berjudul “Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review” oleh Omran, MA dan D. Ramdhony dari Xi'an Jiaotong - Liverpool University dan University of Mauritius, menyimpulkan, the findings show that there is no universal theory applicable on corporate social responsibility disclosure for all situations or societies. While legitimacy theory suggests CSR disclosures are part of a process of legitimization, stakeholder theory offers an explanation of CSR accountability to stakeholders. Legitimacy theory seems to be more suitable for organizations working in developed countries, on the other hand, stakeholder theory appears to be most suitable for organizations working in developing countries; where a corporation can manage its stakeholders and the pressure to comply with existing legislation is less as compared to the developed countries. Social contract theory is appropriate for developed/emerged economies, as CSR disclosure exists due to an implicit social contract between business and society, which implies some indirect obligations of business towards society. Signalling theory will suit a situation where firms are competing for resources. A firm willing to demarcate from other firms will engage

in more CSR practices. It is also important that the signal reaches the target audience by reporting on CSR

2.2. Landasan Teori

Selanjutnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan beberapa pengertian terkait judul penelitian.

2.2.1. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta terdapatnya kesesuaian dalam sebuah kegiatan antara seseorang yang sedang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Makmur (2011:5) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara, harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Menurut Ramadhan (2019:9) efektivitas adalah sebuah organisasi yang mempunyai sebuah tujuan yang tentunya ingin dicapai serta mempunyai nilai-nilai yang telah disepakati bersama-sama oleh stekholder bersama dengan organisasi yang bersangkutan.

Rumus Efektivitas adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.
- Bila hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

2.2.2. Pengertian Pinjaman atau Kredit

KBBI mendefinisikan pinjaman kata dasarnya adalah pinjam yang berarti memakai barang (uang) orang lain dalam jangka waktu tertentu (jika sudah sampai pada waktunya, maka harus dikembalikan). Sedangkan kredit menurut KBBI adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembaliannya secara mengangsur.

UU No. 10/1998 perubahan atas UU No. 7/1992 pasal 1 (11) tentang perbankan, ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Hasibuan (2009), menjelaskan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya oleh peminjam dengan perjanjian yang sudah disepakati

Menurut Rivai et al (2014) kredit diartikan sebagai penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi pinjaman atau kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (penghutang/borrower ataupun nasabah) dengan perjanjian pembayaran kredit dilakukan pada waktu yang kedua belah pihak telah sepakati.

Dari pengertian dan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah penggunaan baik berupa barang maupun uang dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dimana pembayaran pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan.

Dari definisi diatas, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit (BUMN) bahwa kredit yang ia diberikan baik yang berupa barang, uang, atau jasa benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur yang terkandung dalam pemberian kredit antara pemberi pinjaman (BUMN) dengan penerima pinjaman. Kesepakatan di catat dalam perjanjian dimana kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Kredit memiliki jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu ini mencakup kapan pengembalian kredit yang sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak. Jangka waktu dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Resiko

Karena terdapatnya jangka waktu maka pengembalian kredit akan menimbulkan resiko tidak tertagih. Semakin panjang jangka waktu dari suatu kredit maka semakin besar pula resiko tidak tertagihnya kredit tersebut. Resiko merupakan tanggungan dari pihak pemberi pinjaman (BUMN).

e. Balas jasa

Bagi BUMN balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan nama bunga.

Kredit mempunyai sifat yang fleksibel, yaitu mengikuti kebutuhan dari calon debitur sehingga calon debitur hanya perlu memilih jenis kredit yang sesuai dengan tujuan yang mereka harapkan atau butuhkan. Mengingat sifatnya yang fleksibel, maka banyak bermunculan jenis-jenis kredit yang dibedakan menurut berbagai fungsi dan sifatnya. Secara umum jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jenis kredit berdasarkan jenis pembiayaan, yaitu bentuk kredit dilihat berdasarkan obyek yang dibiayai dengan kredit tersebut, antara lain:

- a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit kepada debiturnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal yang habis pakai dalam satu siklus usahanya, yaitu mulai dari perolehan uang tunai dari kredit yang diperoleh, digunakan untuk membeli bahan baku agar dapat diproses lebih lanjut, lalu dijual, untuk memperoleh uang kas kembali.

- b. Kredit investasi, adalah kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit kepada debiturnya dan digunakan untuk melakukan investasi/pembelian barang-barang modal, yaitu barang yang tidak habis dalam satu siklus usahanya, artinya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas, kredit investasi memerlukan jangka waktu yang cukup panjang, setelah melalui beberapa kali perputaran.
2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya, yaitu dapat dibedakan menjadi:
- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun, misalnya kredit yang digunakan untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan.
 - b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang memiliki jangka waktu pengembaliannya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, sebagai contoh kredit untuk menambah modal kerja/membeli bahan baku.
 - c. Kredit jangka panjang, ialah kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 (tiga) tahun, misalnya kredit untuk investasi atau untuk perluasan usaha.

Fasilitas pinjaman yang disediakan oleh BUMN untuk usaha kecil dan koperasi, biasa disebut dengan pinjaman kemitraan. Pinjaman kemitraan merupakan pinjaman untuk modal kerja dan/atau pinjaman investasi. Pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai pengembangan usaha yang berupa peningkatan produksi melalui pembelian bahan baku, penambahan mesin-mesin dan penggunaan modal kerja lainnya. Sedangkan dilihat dari jangka waktu pengembalian pinjamannya, kredit yang diberikan oleh BUMN termasuk kredit menengah, atau bahkan jangka panjang.

BUMN juga memberikan fasilitas pembiayaan lainnya yang berupa pembinaan terhadap usaha kecil, berupa hibah pembinaan dimana mitra yang memperoleh hibah pembinaan tidak harus melakukan pengembalian. Hibah pembinaan ini berupa pendanaan untuk pembinaan dalam bentuk pelatihan teknis dan manajerial, pemasaran dan promosi dagang, serta pemagangan dan studi banding.

Mengingat jumlah dana yang tersedia pada BUMN untuk pinjaman kemitraan ini cukup besar dan pastinya terdapat risiko yang mungkin terjadi, maka BUMN harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemberian pinjaman. Dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip yang diterapkan, BUMN berharap dapat memperkecil resiko yang mungkin terjadi.

2.2.2.1. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman

Dalam pemberian pinjaman kepada pihak lain, BUMN perlu pertimbangan serta kehati-hatian agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian pinjaman tersebut tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Menurut Munawir (2007:235) dalam pemberian pinjaman terdapat prinsip atau azas pemberian pinjaman yang dikenal dengan prinsip “6C”, yang terdiri dari:

1. Character/karakter (watak/kepribadian)

Karakter adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Penilaian terhadap Character ini untuk mengetahui apakah nantinya calon debitur ini mempunyai itikad untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.

2. Capacity/kapasitas (kemampuan)

Kapasitas merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Dengan kata lain penilaian dengan Capacity digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh calon debitur.

Penilaian Capacity dapat dilakukan dengan pendekatan historis, yuridis, manajerial, teknis, dan financial

3. Capital (Modal)

Modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba,

struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi yang sudah ditulis di atas bisa dinilai apakah calon debitur layak diberi pembiayaan atau tidak, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Pada intinya semakin besar Capital yang dimiliki oleh calon debitur maka semakin tinggi kesungguhan yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya sehingga pihak BUMN dapat lebih yakin untuk memberikan kredit.

4. Collateral (Jaminan)

Jaminan ialah sesuatu yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Collateral ini biasanya diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Collateral dapat berupa kebendaan, jaminan pribadi, letter of comfort, letter of guarantee, rekomendasi dan juga avails. Penilaian dari segi ekonomis dan yuridis dapat digunakan untuk menilai apakah dapat dijadikan sebagai agunan atau tidak.

5. Condition (Kondisi)

Kondisi maksudnya adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi pemasaran.

6. Constraint (Hambatan)

Constraint merupakan kendala yang dapat memungkinkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan pada tempat tertentu.

Enam prinsip atau syarat tersebut menjadi pedoman bagi kreditur (BUMN) dalam pemberian pinjaman. Untuk dapat terpenuhinya enam prinsip atau syarat tersebut maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman perlu menjadi perhatian.

2.2.3. Analisis Pinjaman

Di samping menggunakan 6C menurut Kasmir (2012:120) penilaian suatu kredit layak atau tidak layak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada, dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasa digunakan untuk proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian kredit antara lain:

1. Aspek hukum/yuridis

Aspek hukum memiliki tujuan yaitu untuk menilai keaslian dan absahan dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini bertujuan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2. Aspek pemasaran (Marketing)

Pada aspek pemasaran ini dinilai seberapa besar permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan calon debitur, dan juga dinilai bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana prospek usaha dari perusahaan calon debitur.

3. Aspek keuangan

Analisa ini dilakukan kepada perusahaan calon debitur, karena analisis ini sangat menentukan berapa jumlah deri kebutuhan usaha nya dan juga yang terpenting analisis ini dilakukan untuk menilai bagaimana kemampuan berkembang nya usaha pada masa yang akan datang dan juga untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

4. Aspek teknis

Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengamati perusahaan baik dari segi fisik maupun lingkungan perusahaan, agar perusahaan mempunyai produk yang sehat dan tentunya produk tersebut dapat bersaing di pasaran dengan tujuan memperoleh keuntungan yang memadai.

5. Aspek manajemen

Penilaian aspek manajmen dilakukan untuk menilai bagaimana struktur organisasi pada perusahaan, bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki dan

juga bagaimana pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Pengalaman dari perusahaan dalam menjalankan proyek juga dapat dijadikan pertimbangan.

6. Aspek sosial ekonomi

Aspek ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari usaha yang dijalankan terhadap perekonomian dan sosial masyarakat secara umum.

7. Aspek AMDAL

Adalah analisis terhadap lingkungan darat, udara maupun laut dan termasuk juga kesehatan manusia saat usaha permohonan kredit dijalankan. Analisis ini harus dilakukan agar usaha yang dijalankan tidak membuat pencemaran.

2.2.4. Pengertian UMKM, UKM dan Koperasi

Pengertian usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dijelaskan sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

Sedangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) diatur oleh beberapa peraturan berikut ini :

1. Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993. Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah suatu usaha yang mempunyai total asset Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang sedang ditempati. Pengertian usaha kecil ini terdiri dari badan swasta dan koperasi, usaha perseorangan, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp. 600.000.000
2. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan. Pengusaha kecil dan menengah adalah industri tradisional, industri kerajinan, maupun kelompok industri modern yang memiliki investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70.000.000 ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja sebesar Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
3. Menurut Badan Pusat Statistik. Usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:
 - (i) Usaha Rumah tangga yang memiliki 1-5 tenaga kerja
 - (ii) Usaha kecil menengah dengan 6-19 tenaga kerja
 - (iii) Usaha menengah yang mempunyai 20-29 tenaga kerja
 - (iv) Usaha besar dengan lebih dari 100 tenaga kerja.
4. Sedangkan dalam konsep Inpres UKM yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria:
 - (i) Asset Rp. 50.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - (ii) Omset Rp. 250.000.000.000

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di jelaskan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang terdiri dari 2 bentuk koperasi yaitu:

1. Koperasi primer

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sekurang-kurangnya 20 orang.

2. Koperasi skunder

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi sekurang-kurangnya 3 koperasi primer.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan juga kemampuan ekonomi khususnya dari para anggota, dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan juga masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.5. Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Pembinaan usaha kecil dan koperasi yang memanfaatkan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan dengan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa perusahaan perseroan (PERSERO) dan perusahaan umum (PERUM)
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang mempunyai skala kecil dan memenuhi kriteria berupa kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
3. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil (selanjutnya disebut program kemitraan) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil supaya menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. Mitra binaan adalah usaha kecil yang memperoleh pinjaman dana dan sebagainya dari program kemitraan.
5. BUMN Pembina adalah BUMN yang bertanggungjawab melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
6. Dana program kemitraan bersumber dari:
 - Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3%.
 - Hasil bunga pinjaman/bagi hasil, bunga deposito dan jasa giro yang berasal dari dana program kemitraan setelah dikurang beban operasional.
 - Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain jika ada.
7. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - Pinjaman yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan jumlah atau kualitas produksi dan penjualan usaha.
 - Pinjaman khusus
 - 1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha bagi perusahaan mitra binaan yang sifat nya jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dai rekan usaha mitra binaan.
 - 2) Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak, yaitu BUMN, mitra binaan dan rekanan usaha mitra binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN.
 - Hibah
 - 1) Dana digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan

produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang mempunyai hubungan dengan program kemitraan.

- 2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20% (duapuluh persen) dari total dana program kemitraan yang disalurkan untuk tahun berjalan.

8. Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan

- Diawali dengan calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pengembangan usahanya kepada BUMN Pembina, dengan menyiapkan sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha.
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus usaha.
 - 3) Bukti identitas diri dari pemilik/pengurus.
 - 4) Bidang usaha yang dijalankan.
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha yang diperoleh dari pihak yang berwenang (jika ada).
 - 6) Pekekembangan dari kinerja usaha.
 - 7) Rencana usaha yang akan dijalankan dan dana yang dibutuhkan.
- BUMN Pembina melakukan evaluasi serta seleksi atas permohonan yang telah diajukan oleh calon mitra binaan
- Calon mitra binaan yang memenuhi kriteria kelayakan untuk di bina, harus menyelesaikan proses administrasi pinjaman.
- Pemberian pinjaman untuk calon mitra binaan akan dicatat dalam surat perjanjian sebagai berikut:
 - 1) Nama serta alamat BUMN Pembina yang menyalurkan dana dan mitra binaan.
 - 2) Hak serta kewajiban dari BUMN Pembina penyalur dan dan mitra binaan.
 - 3) Jumlah pinjaman dana dan peruntukan dana tersebut.
 - 4) Syarat-syarat pinjaman yang harus di penuhi seperti jadwal angsuran, jangka waktu pinjaman, serta jasa administrasi pinjaman.
- Untuk BUMN Pembina dan sebagainya dilarang untuk memberikan pinjaman kepada mitra binaan apabila calon mitra binaan tersebut telah menjadi binaan dari BUMN lainnya.

2.2.6. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat diketahui definisi dari efektivitas pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut:

Efektivitas pengembalian pinjaman merupakan ketepatan waktu pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur (BUMN) dengan debitur (mitra binaan). Dengan kata lain dana yang dipinjam oleh debitur (mitra binaan) dapat dikembalikan atau disetorkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tanpa adanya keterlambatan. Kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris “collectible” yang berarti dapat ditagih, atau tagihan yang dapat ditagih oleh pengelola pinjaman, kepada peminjam/debitur, sebagai akibat dari transaksi pinjam-meminjam.

Kolektibilitas pinjaman merupakan pengelompokan para mitra binaan berdasarkan kemampuan masing-masing mitra binaan dalam membayar pokok dan bunga kredit yang diterima dari peminjam (BUMN) sehingga kolektibilitas pinjaman dapat digunakan untuk mengetahui sehat atau tidaknya pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur (BUMN) kepada mitra binaan.

2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian

Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mengatur setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Salah satu wujud tanggung jawab sosial adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), PKBL dimaksudkan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Dalam melaksanakan tanggungjawab PKBL, terdapat penyaluran pinjaman program kemitraan dan juga kolektibilitas yang harus berjalan dengan efektif agar program PKBL berjalan dengan baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

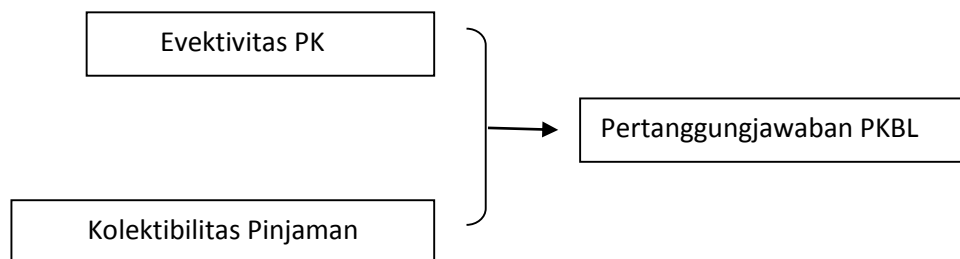
Sebagaimana diketahui bahwa maksud pemerintah melalui BUMN memberikan fasilitas pinjaman dengan jasa administrasi (bunga) rendah, dengan prosedur dan persyaratan khusus yang lebih sederhana adalah untuk mendorong

usaha kecil dan koperasi dalam memperluas meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha kecil dan koperasi diharapkan dapat menaikkan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk menuju kemandirian usaha. Disisi lain BUMN perlu mengamankan fasilitas (pinjaman) yang diberikan dari risiko macet. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian dan keputusan yang tepat agar pinjaman dana tidak di salah gunakan dan tepat sasaran dengan dapat terjaminnya pengembalian yang tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari atau memperkecil risiko dalam pengembalian pinjaman, pengelola dana pinjaman pada BUMN harus mengadakan pengkajian yang seksama berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerangka pemikiran berdasarkan tema dan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Penelitian ini diawali dengan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Pemilihan metode tersebut karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh masalah yang diteliti dan adanya kekuatan hubungan fenomena yang dikaji dalam suatu interval pada periode tertentu dengan penyusunan dan penyajian data yang kemudian dikumpulkan pada suatu penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan Laporan PKBL BUMN tahun 2017 - 2019.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan PKBL secara aktif periode waktu 2017 - 2019. Sampel yang digunakan diperoleh dari Laporan PKBL dengan kriteria perusahaan mempunyai kelengkapan data pada sektor PKBL, serta memiliki data keuangan yang diperlukan dalam pengukuran seluruh variabel pada penelitian ini. Terdapat 10 perusahaan BUMN yang menjadi sampel pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
2. PT. TELKOM INDONESIA TBK
3. PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK
4. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
5. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
6. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
7. PT. BUKIT ASAM TBK
8. PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK
9. PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)
10. PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

3.3. Data dan Metoda Pengumpulan Data

3.3.1. Data yang Diperlukan

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan diolah dari literatur, buku, majalah, laporan, dan berbagai jurnal yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan dan tentunya berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data pada penelitian ini diperoleh dari Laporan PKBL BUMN tahun 2017 - 2019.

3.3.2. Metoda Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metoda dokumentasi, metoda dokumentasi merupakan sebuah proses untuk mendapatkan data yang dipublikasikan oleh pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informasi-informasi yang dikumpulkan berupa data penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) dan data kolektibilitas pengembalian pinjaman pada masing-masing laporan keuangan tahunan Perusahaan BUMN.

3.3.3. Penelitian Kepustakaan (library research)

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah “hubungan kualitas pemberian pinjaman kemitraan BUMN dengan efektivitas tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman”. Kualitas tersebut merupakan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip “5C” dalam penilaian kelayakan proposal/berkas permohonan pemberian kredit/pinjaman kemitraan dan dihubungkan dengan efektivitas tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman kemitraan masing-masing mitra binaan.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan laporan PKBL. Waktu penelitian adalah tahun 2017 - 2019 dengan melihat review dari beberapa penelitian sebelumnya.

3.5. Analisis Data

Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu “Analisis Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan (PK) Dan Tingkat Kolektibilitas Pinjaman Sebagai Pertanggungjawaban PKBL BUMN Pada Tahun 2017 - 2019” maka terdapat tiga variabel penelitian yaitu:

1. Efektivitas penyaluran pinjaman, yaitu berupa hasil penilaian atas penerapan prinsip “5C” dalam penilaian permohonan pemberian pinjaman kemitraan yang diajukan oleh calon mitra binaan sebagai variabel X_1 .
2. Tingkat kolektibilitas/pengembalian pinjaman sebagai variabel X_2 .
3. Pertanggungjawaban PKBL sebagai variable Y .

Dengan menggunakan metoda analisis deskriptif, adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

3.5.1. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002, adapun indikator yang akan dinilai yaitu sebagai berikut:

Indikator	Bobot
1. Efektivitas Penyaluran Pinjaman	3
2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	3
TOTAL	6

Berikut penilaian untuk masing-masing indikator

3.5.1.1. Efektivitas Penyaluran Dana

Rumus efektivitas penyaluran dana yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana tersedia}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Jumlah dana yang tersedia merupakan semua dana pembinaan yang tersedia dalam kurun waktu tertentu, jumlah dana yang tersedia terdiri atas :

- Saldo awal Program Kemitraan.
- Pengembalian Pinjaman oleh mitra binaan.
- Setoran eks pembagian laba yang diperoleh dalam tahun tertentu (termasuk alokasi dana PUKK BUMN lain, jika ada).
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK.

Jumlah dana yang disalurkan merupakan semua dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) dalam tahun tertentu di dalamnya terdapat hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana pinjaman (dana yang disalurkan untuk menjamin pinjaman usaha kecil serta koperasi kepada Lembaga Keuangan).

3.5.1.2. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Rumus efektivitas penyaluran pinjaman yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah Pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK merupakan perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman pada masing-masing kategori kolektibilitas (penagihan) samapi dengan periode akhir tahun buku yang berhubungan. Sedangkan bobot untuk masing-masing tingkat penagihan adalah sebagai berikut :

- Lancar = 100%
- Kurang Lancar = 75%
- Ragu-ragu = 25%
- Macet = 0%

Jumlah Pinjaman yang disalurkan merupakan seluruh pinjaman yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) sampai dengan periode akhir tahun buku yang berhubungan.

3.5.1.3. Daftar Penilaian Tingkat Penyerapan Dana PUKK

Penyerapan (%)	>90	85 s/d 90	80 s/d 85	<80
Skor	3	2	1	0

Penjelasan :

- Efektivitas penyaluran pinjaman dan tingkat kolektibilitas pinjaman yang mempunyai persentase diatas 90% mendapatkan bobot 3 (Sangat Efektiv).
- Efektivitas penyaluran pinjaman dan tingkat kolektibilitas pinjaman yang mempunyai persentase diatas 85% - 90% mendapatkan bobot 2 (Efektiv).
- Efektivitas penyaluran pinjaman dan tingkat kolektibilitas pinjaman yang mempunyai persentase diatas 80% - 85% mendapatkan bobot 1 (Cukup Efektiv).
- Efektivitas penyaluran pinjaman dan tingkat kolektibilitas pinjaman yang mempunyai persentase dibawah 80% mendapatkan bobot 0 (Kurang Efektiv).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kementrian BUMN

Pada tahun 1973 sampai 1993, unit yang akan menangani dalam hal pembinaan BUMN berada setingkat dengan Eselon II. Unit organisasi itu diberi nama Direktorat Persero dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara, kemudian terjadi perubahan pada nama menjadi Direktorat Persero dan Badan Usaha Negara. Hingga sampai dengan tahun 1993 organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Seiring berjalannya waktu pada periode 1993 sampai 1998, organisasi ini yang awalnya memiliki tingkatan Eselon II, kemudian ditingkatkan menjadi Eselon I atau setara dengan Direktorat Jendral, dengan menggunakan nama Direktorat Jendral Pembinaan Badan Usaha Negara. Dalam periode 1993 sampai 1998 tercatat terdapat 2 orang Direktur Jendral Pembinaan BUMN, yaitu Bapak Bacelius Ruru dan Bapak Martiono Hadianto.

Pada tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia merubah bentuk organisasi dan juga pengelola BUMN menjadi berada pada tingkat Kementrian, dengan menggunakan nama Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN atau Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai tahun 2001, struktur organisasi dalam Kementrian ini dihapus dan kembali mejadi setingkat Eselon I. Namun pada tahun 2001, saat terdapatnya suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi yang membina BUMN mengembalikan lagi fungsi dari oerorganisasi ini menjadi setingkat degan Kementrian sampai dengan saat ini.

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kementrian BUMN

4.1.2.1. Tugas Pokok Kementrian BUMN

Kementrian BUMN memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Badan Usaha Milik Negara, dengan tujuan untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan negara.

Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung ataupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2.2. Fungsi Kementerian BUMN

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan perumusan serta penetapan kebijakan pada bidang penyusunan inisiatif strategi bisnis, penguatan daya saing dan juga sinergi, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, pengembangan sebuah usaha, restrukturisasi, peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN dan juga penguatan kinerja.
2. Koordinasi dan juga sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penciptaan pertumbuhan yang berkelanjutan, restrukturisasi, penguatan daya saing dan juga sinergi, penguatan kinerja, pengembangan suatu usaha, serta peningkatan dari kapasitas sebuah infrastruktur bisnis BUMN.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BUMN.
4. Pengelolaan barang kepemilikan negara yang merupakan tanggungjawab kementerian BUMN.
5. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan dan juga pemberian dukungan administrasi pada lingkungan BUMN.

4.2. Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2017.

Tabel 4.2.1

Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2017

No	Perusahaan BUMN	Jumlah Dana Disalurkan	Jumlah Dana Tersedia	Efektivitas (%)	Skor	Keterangan
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.71.083.779.438	Rp.167.509.601.968	42%	0	Kurang Efektif
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	Rp.307.061.000.000	Rp.328.021.000.000	94%	3	Sangat Efektif
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	Rp. 8.810.000.000	Rp.10.050.000.000	88%	2	Efektif
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.209.556.846.450	Rp.534.973.659.302	39%	0	Kurang Efektif
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp. 51.324.985.219	Rp.130.165.422.333	39%	0	Kurang Efektif
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp. 6.201.200.000	Rp.55.540.348.172	11%	0	Kurang Efektif
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp. 62.457.987.607	Rp.65.387.357.207	96%	3	Sangat Efektif
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.53.692.592.000	Rp.60.280.419.905	89%	2	Efektif
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp.1.021.000.000	Rp.1.093.000.000	93%	3	Sangat Efektif
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.4.465.347.975	Rp.21.249.378.704	21%	0	Kurang Efektif

Sesuai dengan tabel 4.3 pada tahun 2017, dari total sampel 10 perusahaan BUMN terdapat 3 perusahaan BUMN yang masuk kedalam kategori sangat efektif yaitu PT. TELKOM INDONESIA TBK dengan efektivitas mencapai 94% dan memperoleh skor 3. Selanjutnya terdapat PT. BUKIT ASAM TBK dengan efektivitas program kemitraan sebesar 96% sehingga memperoleh skor 3. Dan perusahaan BUMN terakhir yang termasuk kedalam kategori sangat efektif pada pelaksanaan penyaluran pinjaman program kemitraannya di tahun 2017 adalah PT. LEN INDUSTRI dengan efektivitas 93% dan memperoleh skor sebesar 3.

Selanjutnya terdapat 2 perusahaan BUMN yang mendapat kategori efektif pada tahun 2017. Yang pertama PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK dengan dengan persentase efektivitas sebesar 88% dan mendapatkan skor 2. Selanjutnya perusahaan yang memperoleh kategori efektif adalah PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK, dengan persentase efektivitas 89% dan skor 2.

Dan yang terakhir adalah perusahaan BUMN yang masih kurang efektif dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman program kemitraan di tahun 2017. Terdapat 5 perusahaan BUMN yang masih kurang efektif yaitu PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK dengan persentase efektivitas sebesar 42% dan memperoleh skor 0. Kemudian terdapat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) yang masih kurang efektif dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman kemitraannya dengan persentase yang sama yaitu sebesar 39% dan mendapatkan skor 0. Selanjutnya yaitu PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, dengan persentase yang terkecil yaitu 11% dan skor 0. Yang terakhir yaitu PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA dengan memperoleh persentase penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar 21% dan mendapatkan skor 0.

4.3. Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2018.

Tabel 4.3.1

Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2018

No	Perusahaan BUMN	Jumlah Dana Disalurkan	Jumlah Dana Tersedia	Efektivitas (%)	Skor	Keterangan
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.104.490.059.347	Rp.135.230.060.342	77%	0	Kurang Efektiv
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	Rp.279.098.000.000	Rp.293.048.000.000	95%	3	Sangat Efektiv
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	Rp. 5.921.776.340	Rp.6.688.058.359	89%	2	Efektiv
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.334.475.333.991	Rp.499.783.008.531	67%	0	Kurang Efektiv
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp.53.629.653.171	Rp.81.898.480.554	65%	0	Kurang Efektiv
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp.36.119.512.500	Rp.50.807.105.342	71%	0	Kurang Efektiv
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp.13.291.000.000	Rp. 47.750.000.000	28%	0	Kurang Efektiv
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.55.117.799.200	Rp. 60.628.564.730	91%	3	Sangat Efektiv
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp.1.162.000.000	Rp.1.174.131.122	99%	3	Sangat Efektiv
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.19.205.670.227	Rp.21.052.483.005	91%	3	Sangat Efektiv

Sesuai dengan yang terdapat pada tabel 4.4, dari 10 sampel perusahaan BUMN yang digunakan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 4 perusahaan yang sudah sangat efektif dalam menyalurkan pinjaman program kemitraannya, 1 perusahaan yang efektif, dan terdapat 5 perusahaan yang masih kurang efektif dalam penyaluran dana pinjaman program kemitraannya.

PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) merupakan perusahaan yang paling efektif pada tahun 2018 dikarenakan memiliki persentase efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar 99% dan mendapatkan skor 3. Selanjutnya PT. TELKOM INDONESIA TBK dengan persentase 95% dengan skor 3, sehingga masuk kedalam kategori sangat efektif. PT. JASA MARGA (PERSERO) memiliki persentase sebesar 91% dan skor 3, termasuk dalam perusahaan yang efektif pada penyaluran pinjaman program kemitraannya. Perusahaan terakhir yang masuk dalam kategori sangat efektif pada tahun 2018 adalah PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, dengan persentase sejumlah 91% dan skor 3.

Satu – satunya perusahaan dengan kategori efektif adalah PT. KIMIA FARMA (PERSERO) dengan persentase penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar 89% dan memperoleh skor 3.

Pada tahun 2018 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK memperoleh persentase sebesar 77% sehingga mendapatkan skor 0, dan masuk kedalam kategori kurang efektif. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK juga menjadi perusahaan yang kurang efektif dalam penyaluran pinjaman program kemitraan karena mempunyai persentase 71% dengan skor 0. Berikutnya PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dengan persentase 67% dan skor 0, masuk dalam kategori yang kurang efektif. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) mempunyai persentase efektivitas sebesar 65% sehingga mendapatkan skor 0, dengan kategori kurang efektif. Perusahaan terakhir yang masuk dalam kategori kurang efektif pada penyaluran pinjaman program kemitraan di tahun 2018 adalah PT. BUKIT ASAM TBK dengan persentase 28% dan skor 0.

4.4. Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Masing – Masing Perusahaan BUMN di Tahun 2019.

Tabel 4.4.1

Efektifitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Pada Perusahaan BUMN di Tahun 2019.

No	Perusahaan BUMN	Jumlah Dana Disalurkan	Jumlah Dana Tersedia	Efektivitas (%)	Skor	Keterangan
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.102.171.146.319	Rp.120.435.034.823	85%	2	Efektif
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	Rp.253.044.000.000	Rp.268.048.000.000	94%	3	Sangat Efektif
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	Rp. 6.710.268.650	Rp.7.067.443..249	95%	3	Sangat Efektif
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.332.011.779.429	Rp.453.498.929.118	73%	0	Kurang Efektif
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp.200.850.269.240	Rp.216.353.480.554	93%	3	Sangat Efektif
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp.15.035.950.000	Rp.19.118.064.428	79%	0	Kurang Efektif
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp.50.500.000.000	Rp.40.360.000.000	80%	1	Cukup Efektif
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.55.064.087.183	Rp.59.248.089.861	93%	3	Sangat Efektif
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp.1.084.450.000	Rp.1.102.925.482	98%	3	Sangat Efektif
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.12.761.536.543	Rp.13.493.476.564	95%	3	Sangat Efektif

Seperti yang terdapat pada tabel 4.4 mengenai efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan pada perusahaan BUMN di tahun 2019, dimana ada 6 perusahaan yang masuk kedalam kategori sangat efektif, 1 perusahaan dengan kategori efektif, 1 perusahaan dengan kategori cukup efektif dan 2 perusahaan yang masih kurang efektif dalam penyaluran pinjaman program kemitraannya.

Perusahaan pertama yang masuk kedalam kategori sangat efektif adalah PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) yaitu dengan persentase efektivitas sebesar 98% dan skor 3. Berikutnya ada PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK dan juga PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA dengan efektivitas 95% dan skor sebesar 3. Selanjutnya dengan persentase efektivitas 94% dan skor 3 untuk PT. TELKOM INDONESIA TBK. Ada 2 perusahaan BUMN yang memiliki persentase efektivitas 93% dengan skor 3 yaitu PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) dan juga PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK.

Ditahun 2019 hanya terdapat satu perusahaan yang masuk kedalam kategori efektif yaitu PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK dengan persentase efektivitas 85% dan memperoleh skor 2. Begitu juga dengan kategori cukup efektif yang hanya terdapat 1 perusahaan yaitu PT. BUKIT ASAM TBK dengan persentase efektivitas 80% dan skor 1.

Yang terakhir yaitu perusahaan BUMN yang efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan nya masih kurang efektif di tahun 2019. Terdapat 2 perusahaan, pertama PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK dengan persentase 79% dan skor 0. Kemudian PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dengan persentase efektivitas sebesar 73% dan memperoleh skor 0.

Itulah efektifitas penyaluran pinjaman program kemitraan pada masing – masing perusahaan bumn pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dimana rata – rata efektivitas penyaluran pinjaman sebesar 61% ditahun 2017, kemudian meningkat ditahun 2018 menjadi 77%, dan ditahun 2019 juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 88%.

4.5. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2017.

Tabel 4.5.1
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2017.

No	Perusahaan BUMN	Rata-Rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK	Jumlah Pinjaman Yang Disalurkan	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	Skor
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp. 85.689.887.191	Rp. 87.951.176.021	97%	3
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	-	-	85%	3
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	-	-	-	-
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.226.808.008.581	Rp.263.702.104.556	86%	3
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp.48,667,431,145	Rp.121.609.418.936	40%	2
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp.7,125,159,469	Rp.28.944.759.796	25%	1
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp.2,504,556,500	Rp.23.789.535.242	11%	1
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.74,032,378,144	Rp.97.087.224.882	76%	3
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	-	-	72%	3
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.7,373,764,231	Rp.21.814.740.851	34%	1

Seperti yang terdapat pada tabel 4.5 dimana masing - masing perusahaan melakukan kolektibilitas terhadap pemberian pinjaman dalam program kemitraan, namun terdapat persoalan yang terjadi di lapangan sehingga tidak semua dana pinjaman dapat di kolektif. Adapun penjelasan mengenai tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman pada program kemitraan pada tahun 2017 sesuai dengan tabel 4.5 adalah sebagai berikut.

Dari 10 perusahaan yang di jadikan sampel pada penelitian ini, PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK menjadi perusahaan yang memiliki tingkat kolektibilitas pinjaman tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 97% dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK berjumlah Rp. 85.689.887.191 dan jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 87.951.176.021. Maka indikator skor untuk tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 3. Selanjutnya terdapat PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK yang memperoleh tingkat kolektibilitas pinjaman sebesar 86% serta skor indikator 3, rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp. 226.808.008.581 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp. 263.702.104.556. PT. TELKOM INDONESIA TBK memiliki tingkat kolektibilitas pinjaman 85% dan skor indikator sebesar 3, tidak terdapat rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan juga jumlah pinjaman yang disalurkan dikarenakan PT. TELKOM INDONESIA TBK tidak menjelaskannya pada laporan pkbl melainkan hanya menjelaskan tingkat kolektibilitasnya saja. Berikutnya PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK yang memiliki tingkat kolektibilitas pinjaman sebesar 76% sehingga memperoleh indikator skor 3, dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp. 74,032,378,144 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp. 97.087.224.882. Sama seperti PT. TELKOM INDONESIA TBK, PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) tidak menjelaskan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan jumlah pinjaman yang disalurkan melainkan hanya tingkat kolektibilitasnya saja, yaitu sebesar 72% dan memperoleh skor 3.

Dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK sebesar Rp. 48,667,431,145 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp. 121.609.418.936 maka tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman untuk PT. PERMODALAN

NASIONAL MADANI (PERSERO) adalah 40% dan skor indikator nya adalah 2. PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA memiliki persentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 34% sehingga memperoleh skor indikator 1, sementara itu rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK sebesar Rp. 7,373,764,231 dan jumlah pinjaman yang disalurkan sejumlah Rp. 21.814.740.851. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang kurang baik yaitu sebesar 25% dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK berjumlah Rp. 7,125,159,469 dan jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 28.944.759.796 akibatnya PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK hanya memperoleh skor indikator. PT. BUKIT ASAM TBK menjadi perusahaan yang paling kurang baik pada tingkat kolektibilitas pengembalian pinjamannya, yaitu 11% dengan skor 1 dikarenakan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK hanya Rp. 2,504,556,500 dari jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 23.789.535.242.

4.6. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2018.

Tabel 4.6.1
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2018.

No	Perusahaan BUMN	Rata-Rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK	Jumlah Pinjaman Yang Disalurkan	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	Skor
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.118,768,880,275	Rp. 122.065.832.228	97%	3
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	-	-	89%	3
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	-	-	78%	-
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.4.080.878.987.863	Rp.4.122.342.611.500	99%	3
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp.64.717.887.516	Rp.224.472.897.843	29%	1
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp.38.188.893.173	Rp.59.995.963.293	64%	2
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp.13.271.832.186	Rp.34.832.331.548	38%	1
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.61.511.389.952	Rp.99.982.422.349	62%	2
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp.1.612.114.053	Rp.2.208.448.348	73%	3
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.21.550.987.523	Rp.37.167.050.814	58%	2

Berikut penjelasan mengenai tabel 4.6 di atas mengenai tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman pada program kemitraan pada masing – masing BUMN di tahun 2018. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman paling besar pada tahun 2018 yaitu 99% sehingga memperoleh skor indikator 3, dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp. 4.080.878.987.863 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp. 4.122.342.611.500 Dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp. 118.768.880.275 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp. 122.065.832.228 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang baik sebesar 97% dan skor 3.

PT. TELKOM INDONESIA TBK memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 89% dengan skor indikator 3. PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK juga mendapatkan skor indikator 3 dengan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman sebesar 78%. Kedua perusahaan ini sama – sama tidak menjelaskan sebesarapa besar rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan juga jumlah pinjaman yang disalurkan pada laporan PKBL nya. Selanjutnya PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan juga jumlah pinjaman yang disalurkan masing - masing sebesar Rp.1.612.114.053 dan Rp.2.208.448.348, memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 73% maka skor indikator nya adalah 3. Berikutnya dengan tingkat kolektibilitas 64%, PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK memiliki skor indikator 2 saldo rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.38.188.893.173, jumlah pinjaman yang disalurkan Rp.59.995.963.293. PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK memiliki rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.61.511.389.952 dan jumlah pinjaman yang disalurkan Rp.99.982.422.349, sehingga memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 62% dan skor indikator 2. Kemudian PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA memiliki rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan jumlah pinjaman yang disalurkan masing – masing sebesar Rp.21.550.987.523 dan Rp.37.167.050.814 mendapatkan tingkat kolektibilitas 58% dan skor 2. PT. BUKIT ASAM TBK memiliki tingkat kolektibilitas yang kurang baik yaitu 38% dengan skor 1, dikarenakan rata-rata tertimbang

kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.13.271.832.186 dari jumlah pinjaman yang disalurkan Rp.34.832.331.548. Dan yang terakhir perusahaan yang memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman paling kecil yaitu hanya 29% dengan skor 1 adalah PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) karena dari total jumlah pinjaman yang disalurkan Rp.224.472.897.843, rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK nya hanya sebesar Rp.64.717.887.516.

4.7. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN Tahun 2019.

Tabel 4.7.1
Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan pada Masing – Masing BUMN di Tahun 2019.

No	Perusahaan BUMN	Rata-Rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK	Jumlah Pinjaman Yang Disalurkan	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	Skor
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp. 116.086.210.045	Rp.119.601.293.710	97%	3
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK	-	-	87%	3
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK	-	-	83%	3
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp.402.260.827.647	Rp.452.778.734.596	89%	3
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	Rp.80.426.918.679	Rp.238.189.427.692	34%	1
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp.32.250.094.155	Rp.54.385.072.993	59%	2
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp.34.588.319.320	Rp.53.087.344.657	65%	2
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp.74.988.524.593	Rp.101.833.823.575	74%	3
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)	Rp .1.748.869.877	Rp.2.291.568.342	76%	3
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp.22.329.086.053	Rp.37.009.717.267	60%	2

Tabel 4.6 berisi tentang tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman program kemitraan yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan BUMN di tahun 2019. Dimana dapat dilihat pada tahun 2019 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK memiliki tingkat kolektibilitas yang paling baik yaitu 97% dan memperoleh skor indikator 3, dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp. 116.086.210.045 dari dana yang disalurkan sebesar Rp.119.601.293.710. Selanjutnya di urutan kedua dengan tingkat kolektibilitas pinjaman sebesar 89% dengan skor indikator 3, yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.402.260.827.647 dari total jumlah pinjaman yang disalurkan Rp.452.778.734.596. Pada urutan ketiga terdapat PT. TELKOM INDONESIA TBK yang cukup baik, dengan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 87% serta skor 3 namun PT. TELKOM INDONESIA TBK tidak menjelaskan secara rinci berapa rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan jumlah dana yang disalurkan.

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 83% dan skor indikatornya 3, sama seperti PT. TELKOM INDONESIA TBK yang tidak menjelaskan rincian rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK serta jumlah dana yang disalurkan. PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) juga memiliki tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang baik yaitu 76% dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp .1.748.869.877 dari total jumlah dana yang disalurkan Rp.2.291.568.342, skor indikatornya adalah 3. 74% merupakan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK, skor indikator nya adalah 3 dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.74.988.524.593 dan jumlah dana yang disalurkan Rp.101.833.823.575. Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK dan total jumlah dana yang disalurkan untuk PT. BUKIT ASAM TBK masing – masing adalah Rp.34.588.319.320 dan Rp.53.087.344.657, sehingga persentase tingkat kolektibilitas pinjamannya adalah 65% dengan skor 2.

Berikutnya untuk PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA memiliki tingkat kolektibilitas pinjaman sebesar 60% dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.22.329.086.053 dari total dana pinjaman yang disalurkan Rp.37.009.717.267 dan skor indikator tingkat kolektibilitas pinjamannya adalah 2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK mempunyai tingkat kolektibilitas pinjaman 60% dan skor 2, dengan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK Rp.22.329.086.053 dari dana pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.37.009.717.267. Dan yang terakhir adalah perusahaan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) dengan tingkat kolektibilitas pinjaman 34% dan skor 1, menjadi perusahaan yang memiliki tingkat kolektibilitas paling kecil dikarenakan rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK hanya sebesar Rp.80.426.918.679 dari total dana pinjaman yang disalurkan kepada mitra binaan sebesar Rp.238.189.427.692.

BAB V

Simpulan dan Saran

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan dan juga tingkat kolektibilitas pinjaman terhadap pertanggungjawaban PKBL BUMN pada periode 2017 – 2019. Berdasarkan hasil data yang telah diolah serta penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019, terdapat banyak perusahaan yang sudah sangat baik dan cukup efektif dalam melaksanakan penyaluran pinjaman program kemitraan kepada para mitra binaan masing – masing perusahaan, dapat dibuktikan dengan persentase efektivitas yang cukup tinggi. Namun sangat disayangkan karena masih terdapat nya beberapa perusahaan yang kurang efektif, hal ini ditunjukkan dengan persentase yang cukup rendah.
2. Sama hal nya dengan efektivitas penyaluran pinjaman, pada tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman banyak perusahaan BUMN yang memiliki persentase tinggi dimana itu berarti kolektibilitas pengembalian pinjaman sudah sangat baik. Terdapat juga beberapa perusahaan BUMN yang masih memiliki tingkat kolektibilitas pegembalian pinjaman cukup rendah, ditandai dengan persentase tingkat kolektibilitas yang kecil.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas, penulis berupaya untuk dapat memberikan beberapa saran. Dimana saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk pihak – pihak dibawah ini :

1. Bagi Perusahaan.

Perusahaan dapat menyalurkan dana pinjaman kemitraan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, agar bisa mencapai efektivitas penyaluran pinjaman program kemitraan yang baik serta persentase yang tinggi.

Perusahaan juga bisa lebih memperhatikan prinsip pemberian pinjaman “6C” agar dapat memutuskan mitra binaan seperti apa yang bisa diberikan pinjaman, sehingga kolektibilitas pengembalian pinjaman dapat lebih maksimal dan pelaksanaan program kemitraan berjalan dengan baik.

2. Bagi Mitra Binaan.

Mitra binaan yang mendapatkan pinjaman sebaiknya dapat lebih bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara mitra binaan dengan perusahaan pemberi pinjaman.

5.3. Keterbatasan serta Pengembangan Penelitian Selanjutnya

5.3.1. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Banyak nya perusahaan yang belum melakukan publikasi laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di tahun terakhir (2020) sehingga tidak dapat melakukan penelitian dengan data yang terbaru.
2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualitas pinjaman nya, melainkan hanya mencantumkan tingkat kolektibilitas pengembalian nya saja.

Daftar Referensi

- Anisa, Nurul Suci., Isharijadi Isharijadi., Elly Astuti (2018). Analisis Efektifitas Pkbl Sebagai Wujud Csr (Studi Kasus Perkembangan Umkm Mitra Binaan PT. INKA Madiun. Jurnal Fipa Vol 6, No. 2
- Badia, Maria Teresa Bosch., Joan Montllor-Serrats*, Maria Antonia Tarrazon-Rodon (2014) Corporate Social Responsibility from the Viewpoint of Social Risk. *Theoretical Economics Letters*, Vol.4, October, 2014. DOI: 10.4236/tel.2014.48081
- Hadi Ismanto., Tohir Diman (2014). Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi. *Jurnal Economia*, Jilid 10, Terbitan 2 Halaman 148-164. <https://doi.org/10.21831/economia.v10i2.7541>
- Hasibuan, M. S. P (2009). *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Munawir, S. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Omran, Mohamed. A., & Ramdhony, D. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 38. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v5i2.8035>
- Ramadhan, E. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Di PTPN II Tanjung*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3365>
- Rivai, V., Veithzal, A.P., & Veithzal, A. P. (2014) *Credit Management Handbook*. Rajawali Press.
- Sari, Desi Novita., & Septiani Fransisca (2018). Analisis Prosedur Pinjaman Dana Kemitraan Oleh Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Pusri. *Prosiding Semhavok*, jilid 1, terbitan, halaman 1–10. <http://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/15>
- Suryana, A. D., Raharja, S., & Saleh, A. (2015). Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Program Kemitraan di PKBL PT Sucofindo, Jakarta. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 10(1), 84–98. <https://doi.org/10.29244/mikm.10.1.84-98>

Undang- Undang (Peraturan):

- Undang-Undang NOMOR 10 TAHUN 1998. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992. TENTANG PERBANKAN.;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *BUMN*;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*;
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*;
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang *Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*;
- Keputusan Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan*;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan PKBL*;
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang *Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta program Bina Lingkungan*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang *Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*;
- Per-08/MBU/2013 tentang *Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan*.

- Per-07/MBU/05/2015 tentang *Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*.
- Per-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Per-03/MBU/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi dengan hal-hal pokok

Lampiran 1

DAFTAR LAMPIRAN

Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat

Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2017

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman yang Disalurkan					Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman					Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2017
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	TOTAL	100%	75%	25%	0	TOTAL	
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	Rp 84.7 49.8	Rp 1.080.	Rp 517.9	Rp 1.602.	Rp 87.951	Rp 84.749	Rp 810.58	Rp 129.4	R	Rp 85.689	97%
2	PT. TELKOM INDONESIA Tbk											85%
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO)											
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	Rp 223. 730.	Rp 3.559.	Rp 1.633.	Rp 34.779	Rp 263.70	Rp 223.73	Rp 2.669.	Rp 408.2	R	Rp 226.80	86%
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI	Rp 48.4 85.1	Rp 234.26	Rp 26.26	Rp 72.863	Rp 121.60	Rp 48.485	Rp 175.69	Rp 6.565	R	Rp 48.667	40%
7	PT. BANK TABUNGAN NEGARA	Rp 7.02	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	R	Rp	25%
8	PT. BUKIT ASAM	Rp 2.04 1.49	Rp 608.58	Rp 26.50	Rp 21.112	Rp 23.789	Rp 2.041.	Rp 456.42	Rp 6.627	R	Rp 2.504.	11%
8	PT. JASA MARGA (PERSERO)	Rp 60.0 12.0	Rp 17.325	Rp 4.105.	Rp 15.644	Rp 97.087	Rp 60.012	Rp 12.993	Rp 1.026.	R	Rp 74.032	76%
9	PT. LEN INDUSTRI (PERSERO)											71%
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp 6.21 0.21	Rp 1.439.	Rp 336.4	Rp 13.828	Rp 21.814	Rp 6.210.	Rp 1.079.	Rp 84.10	R	Rp 7.373.	34%
Rata - rata tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman Program Kemitraan											58%	

Lampiran 2

Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat

Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2018

NO	Nama Perusahaan BUMN	Jumlah Dana Disalurkan					Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK 2018					Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	TOTAL	100%	75%	25%	0	TOTAL	
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp 117.6	Rp 1.43 3.83	Rp 132.	Rp 2.838	Rp 122.0	Rp 117.6	Rp 1.07 5.37	Rp 33.1	R	Rp 118.7	97%
2	PT. TELKOM INDONESIA									R		89%
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK									R		78%
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp 4.074. 366.2	Rp 8.05 5.20	Rp 1.88 5.13	Rp 38.03	Rp 4.122. 342.6	Rp 4.074. 366.2	Rp 6.04 1.40	Rp 471.	R	Rp 4.080. 878.9	99%
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI	Rp 64.17	Rp 690.	Rp 104.	Rp 159.5	Rp 224.4	Rp 64.17	Rp 517.	Rp 26.0	R	Rp 64.71	29%
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp 37.39	Rp 1.03 8.93	Rp 67.6	Rp 21.49	Rp 59.99	Rp 37.39	Rp 779.	Rp 16.9	R	Rp 38.18	64%
7	PT. BUKIT ASAM TBK	Rp 12.33	Rp 1.15 9.76	Rp 282.	Rp 21.05	Rp 34.83	Rp 12.33	Rp 869.	Rp 70.6	R	Rp 13.27	38%
8	PT. JASA MARGA (PERSERO)	Rp 58.22	Rp 3.70 4.48	Rp 2.04 1.75	Rp 36.01	Rp 99.98	Rp 58.22	Rp 2.77 8.36	Rp 510.	R	Rp 61.51	62%
9	PT. LEN INDUSTRI	Rp 1.368.	Rp 304.	Rp 62.5	Rp 473.2	Rp 2.208.	Rp 1.368.	Rp 228.	Rp 15.6	R	Rp 1.612.	73%
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp 20.87	Rp 805.	Rp 300.	Rp 15.18	Rp 37.16	Rp 20.87	Rp 603.	Rp 75.0	R	Rp 21.55	58%
Rata - rata tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman Program Kemitraan												69%

Lampiran 3

Rata – rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman PUKK dan Tingkat

Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 2019

NO	Nama Perusahaan BUMN	Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK 2019					Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK 2019					Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	TOTAL	100	75%	25	0	TOTAL	
1	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp 113.9	Rp 1.794	Rp 844.	Rp 2.962	Rp 119.6	Rp 113.9	Rp 1.34	Rp 740.	R R	Rp 116.0	97%
2	PT. TELKOM INDONESIA TBK									R		87%
3	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) TBK									R		83%
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Rp 392.9	Rp 11.31	Rp 3.38 9.24	Rp 45.14	Rp 452.7	Rp 392.9	Rp 8.48 3.85	Rp 847.	R R	Rp 402.2	89%
5	PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI	Rp 80.16	Rp 344.2	Rp 13.3	Rp 157.6	Rp 238.1	Rp 80.16	Rp 258.	Rp 3.33	R	Rp 80.42	34%
6	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	Rp 30.91	Rp 1.665	Rp 354.	Rp 21.45	Rp 54.38	Rp 30.91	Rp 1.24 0.28	Rp 88.6	R	Rp 32.25	59%
7	PT. BUKIT MULIA	Rp 26.47	Rp 10.23	Rp 1.73 0.56	Rp 14.64	Rp 53.08	Rp 26.47	Rp 7.67 6.45	Rp 432.	R	Rp 34.58	65%
8	PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK	Rp 71.61	Rp 3.979	Rp 1.55 7.45	Rp 24.68	Rp 101.8	Rp 71.61	Rp 2.98 4.99	Rp 389.	R	Rp 74.98	74%
9	PT. LEN INDUSTRI	Rp 1.545	Rp 253.5	Rp 52.8	Rp 439.6	Rp 2.291	Rp 1.545	Rp 190.	Rp 13.2	R	Rp 1.748	76%
10	PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA	Rp 20.87	Rp 1.611	Rp 983.	Rp 13.54	Rp 37.00	Rp 20.87	Rp 1.20 8.21	Rp 245.	R	Rp 22.32	60%
Rata - rata tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman Program Kemitraan											72%	

